

TESIS

**PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PADA KPU PROVINSI MALUKU SEBAGAI
IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN AMBON
Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN**



**BARBALINA MATULESSY
NOMOR MAHASISWA 135 20 1986/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

TESIS

**PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PADA KPU PROVINSI MALUKU SEBAGAI
IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN AMBON
Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN**



**BARBALINA MATULESSY
NOMOR MAHASISWA 135 20 1986/PS/MIH**



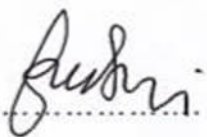
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

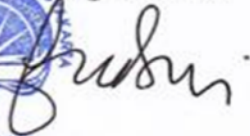


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Nama : BARBALINA MATULESSY
 Nomor Mahasiswa : 135201986/MIH
 Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
 Judul Tesis : Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
 Pada KPU Provinsi Maluku Sebagai Implikasi Pelaksanaan
 Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W.Riawan Tjandra.,S.H.,M.Hum (Ketua)	25/9-2014	
Dr. G.Sri Nurhartanto.,S.H.,LLM (Anggota)	22/9-2014	
Dr. E. Sundari.,S.H.,M.Hum (Anggota)	23/9 '14	

Ketua Program Studi

 PROGRAM
 Dr. E. Sundari.,S.H.,M.Hum



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : BARBALINA MATULESSY
Nomor mahasiswa : 135201986/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Pecalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Pada KPU Provinsi Maluku Sebagai Implikasi Pelaksanaan
Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W.Riawan Tjandra.,S.H., M.Hum

28/8-2014

Dr. G.Sri Nurhartanto.,S.H.,LLM

1/9-2014

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barbalina Matulessy

NPM : 135201986/MIH

Dengan ini menyatakan bawah :

1. Tesis dengan judul : Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada KPU Provinsi Maluku Sebagai Implikasi Pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN merupakan karya asli penulis sendiri dan belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebutkan nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka

Yogyakarta, 1 September 2014

Penulis



Barbalina Matulessy

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku sebagai implikasi dari adanya putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Tipe penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi Maluku dan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan politik hukum. Temuan studi membuktikan bahwa: (1) Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/2013/G/PTUN.ABN yaitu menyangkut gugatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor: 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, mengalami ketidak jelasan dikarenakan ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara (KPU Provinsi Maluku) terhadap putusan PTUN yang telah *inkracht* atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN ditunjukkan dengan cara, proses penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan sampai dengan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. (2) Kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara (KPU Provinsi Maluku) lebih kepada lembaga peradilan lain yaitu Mahkamah Konstitusi tanpa melihat kewenangan mengadili yakni materi dan objek sengketa. (3) Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan suatu Surat Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu secara administrasi telah batal demi hukum. Pembatalan administrasi tersebut dengan sendirinya membatalkan semua proses pemilihan sampai dengan pelantikan.

Kata Kunci: Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/2013/G/PTUN.ABN, Penyelenggaraan Pilkada, Ketidakpatuhan pejabat TUN.

ABSTRACT

This study aimed to examine and analyze the nomination process of Vice Governor and Deputy Governor on the General Election Commission (KPU) of Maluku Province as the implication of the decision of the Administrative Court of Ambon Number: 05/G/2013/PTUN.ABN. This library study dealt with the election of Governor and Deputy Governor by the Maluku Provincial Election Commission (KPU Maluku) and the Administrative Court (PTUN) and used a law political approach as the method. The findings of the study proved that: (1) The Court Administrative Decision of Ambon Number: 05/G/2013/PTUN.ABN regarding to a lawsuit against the Decree of Maluku Provincial Election Commission in 2013 Number: 16/Kpts/KPU-028-PROV/IV/2013 on the Determination of Eligible Pairs of Candidates for the General Election of Governor and Deputy Governor of Maluku Province in 2013 experienced uncertainty due to the Administrative officials noncompliance (Maluku Provincial Election Commission) against the decision of the Administrative Court which has been *inkracht* had permanent legal enforce. The disobedience officer of the Administrative against the deletion of the Administrative Court was indicated by the ongoing election process until the inauguration of the elected Governor and Deputy Governor. (2) The compliance of the Administrative officials (Maluku Provincial Election Commission) tended to be to another judicial institution, the Constitutional Court, without the jurisdiction to try the matter and the object of dispute. (3) The legal consequence from the cancellation of the Decree of Provincial and Regency/City Election Commission on the determination of candidates who fulfilled the administrative requirements had been null and void. The cancellation of the administration itself cancelled all the selection process up to the inauguration.

Keywords: The decision of the Administrative Court (PTUN) of Ambon Number: 05/G/2013/PTUN.ABN, the election system of Governor and vice Governor, the Administrative officials disobedience.

KATA PENGANTAR

Studi ini merupakan sebuah kajian ilmiah dengan judul: **Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada KPU Provinsi Maluku Sebagai Implikasi Pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN**. Berkaitan dengan judul tesis ini, penulis mempunyai ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian khusus terhadap proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada KPU Provinsi Maluku dan pelaksanaan putusan PTUN, dikarenakan putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Provinsi Maluku tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang telah *inkracht* tsanga trentan dan cenderung tidak dipatuhi oleh pejabat Tata Usaha Negara (KPU Provinsi Maluku). Hal ini disebabkan karena, PTUN tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan PTUN yang telah *inkracht*, dimana dasar pelaksanaan eksekusi putusan PTUN adalah pada kesadaran dari pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.

Proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan lancar berkat adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. R. Maryatmo.,M.A, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bpk Drs. M. Parnawa.P.,MB.,PhD, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari.,S.H,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku Anggota/Penguji yang telah memberikan masukan dan petunjuk bagi perbaikan tesis ini.

4. Bpk Dr. W.Riawan Tjandra.,S.H.,M.Hum selaku Ketua/Penguji/Pembimbing Utama yang dengan segala keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, pencerahan pemikiran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penulisan tesis ini.
5. Bpk Dr. G.Sri Nurhartanto.,S.H.,LLM, selaku dosen pembimbing anggota, yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pemikiran, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Bpk/Ibu dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah membentuk wawasan keilmuan di bidang Ilmu Hukum kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bpk Darmawi.,S.H selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu sebagai narasumber bagi penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
8. Bpk Andi Jayadi Nur.,S.H.,M.H, selaku hakim anggota pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN, yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan sumbangan pemikiran selama penulis melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
9. Bpk Drs. A. Rahawarin, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
10. Bpk M. G. Lailossa.,S.H, selaku Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Maluku periode 2003-2014 yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai narasumber kepada penulis.
11. Kedua orang tua tercinta Papa Petrus. Matulesy.,S.Pd.,M.Pd dan Mama Jenny. Matulesy/K.,S.Th.,M.Pd yang telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat,

memberikan dukungan dalam segala hal dan tetap setia mendoakan penulis demi penyelesaian studi ini.

12. Ketiga ade tersayang Olnes Matulesy.,Amd.Kom, Fransiska Matulesy dan Marlon D. Maatoke yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman Angkatan September 2013 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Tommy.H.Wattimena.,S.H, Sally Kristen Merani.,S.H, Debora. K. Yepesse.,S.H, Patiung Liling.,S.S, Yulia Vera. Momuat.,S.H, John Sinartha Wolo.,S.Fi, Hironimus Bawo Wolo.,S.Fi, Dezman Sitohang.,S.H, Veronica Handayani.,S.E dan semua teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materiil maupun pemikiran yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.
14. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan dukungan doa guna terselesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan tesis ini kedepannya. Akhir kata, semoga hasil studi penulis ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 1 September 2014

Penulis

Barbalina Matulesy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Keaslian Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian.....	24
F. Tujuan Penelitian.....	25
G.Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada KPU Provinsi	28
B. Implikasi Pelaksanaan Putusan PTUN	32
C. LandasanTeori.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Hukum.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada KPU Provinsi Maluku Sebagai Implikasi Pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN.....	51
1. Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	51
a. Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut	

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.....	51
b. Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	55
2. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum Republik Indonesia.....	64
3. Pelaksanaan Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN....	68
B. Kendala-kendala Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada KPU Provinsi Maluku Sebagai Implikasi Pelaksanaan Putusan PTUN Ambon.....	84
C. Upaya Mengatasi Kendala-kendala Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada KPU Provinsi Maluku Sebagai Implikasi Pelaksanaan Putusan PTUN Ambon.....	91
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104

Lampiran:

Putusan PTUN Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN

Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Surat Keterangan Penelitian dari KPU Provinsi Maluku

DAFTAR TABEL

Tabel1 Dasar Hukum Tiga Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	9
---	---



DAFTAR GAMBAR

Skema 1	Eksekusi Putusan PTUN.....	38
Skema 2	Penyelesaian Sengketa.....	46
Skema 3	Pelaksanaan Putusan PTUN Terkait Sengketa Pilkada Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	77

